

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

A.A. Gde Sutrisna Wijaya Putra^{1*}, Ni Luh Widyasari²

^{1,2}Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar

*Email: gungtrisna@unmas.ac.id

ABSTRAK: Tingginya pertumbuhan penduduk memberikan dampak terhadap peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan kawasan permukiman dan pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana. Perkembangan pembangunan yang tidak diiringi dengan perkembangan ekonomi masyarakat memicu permasalahan permukiman berupa munculnya permukiman kumuh, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi kekumuhan yang terjadi di Kecamatan Pupuan sebagai kecamatan dengan titik lokasi kawasan permukiman kumuh terbanyak di Kabupaten Tabanan. Metode yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi kekumuhan pada permukiman kumuh Kecamatan Pupuan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang seluruh data dan informasi didapatkan melalui kegiatan observasi ke lapangan. Permukiman kumuh di Kecamatan Pupuan masuk ke dalam kategori kumuh tingkat ringan dengan tingkat kepadatan bangunan yang rendah. Meskipun demikian, adanya ketersediaan jalan lingkungan, drainase, pengelolaan air limbah, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, hingga sarana dan prasarana proteksi kebakaran masih belum memenuhi standar dan persyaratan teknis.

Kata kunci: Permukiman, Kekumuhan, Karakteristik.

ABSTRACT: The high population growth has an impact on the increasing demand for land for the development of residential areas and the fulfillment of infrastructure and facilities needs. The development progress that is not accompanied by the economic growth of the community leads to housing problems, such as the emergence of slum settlements, as seen in Pupuan District, Tabanan Regency. This research was conducted to identify the slum conditions occurring in Pupuan District, which has the highest number of slum settlement locations in the area. The method used to identify the slum conditions in Pupuan District is through qualitative descriptive analysis, with all data and information obtained through field observations. The slum settlements in Pupuan District fall into the category of light slum level with low building density. However, the availability of neighborhood roads, drainage, wastewater management, drinking water supply, waste management, fire protection facilities and infrastructure still don't meet the required technical standards and requirements.

Keywords: Settlement, Slum Conditions, Characteristics.

PENDAHULUAN

Permukiman dapat didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian dimana terdiri dari lebih satuan perumahan yang memiliki fasilitas berupa sarana, prasarana, penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perdesaan dan perkotaan sebagai utilitas umum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011). Sesuai fungsi permukiman sebagai tempat bermukim yang layak untuk dihuni seharusnya mampu memberikan perasaan nyaman serta kondisi aman bagi masyarakat selama tinggal di permukiman tersebut (Stevani et al., 2023). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, tingginya pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi memberikan dampak terhadap tingginya kebutuhan lahan untuk pembangunan kawasan permukiman dan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pendukung (Indrajaya et al., 2022). Kebutuhan akan ruang hunian yang sangat tinggi didukung dengan adanya ketimpangan dalam perihal perekonomian masyarakat tentu akan memicu terjadinya fenomena hunian kurang layak hingga cenderung dalam kondisi kumuh (Praganingrum, 2024). Isu terkait permukiman kumuh menjadi permasalahan penting cukup kompleks jika ditinjau berdasarkan sisi lingkungan, sosial, fisik, ekonomi, sarana dan prasarana (Indrajaya et al., 2022).

Perkembangan pembangunan yang pesat telah dialami oleh Kabupaten Tabanan. Pertambahan penduduk yang tidak diikuti dengan perkembangan pembangunan permukiman di Kabupaten Tabanan menyebabkan munculnya permukiman tidak layak huni dengan kapasitas yang padat serta berdampak pada kondisi lingkungan sekitar, sehingga menciptakan permukiman kumuh di wilayah tersebut (Winata et al., 2021). Permukiman kumuh dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti penurunan kualitas lingkungan, risiko gangguan kesehatan serta dampak sosial ekonomi. Kondisi permukiman kumuh pada umumnya dikaitkan dengan masalah kesehatan akibat sanitasi yang buruk dan lingkungan tercemar akibat pembuangan limbah yang tidak terkendali. Secara sosial ekonomi, permukiman kumuh

memicu adanya kemiskinan penduduk bahkan meningkatkan risiko kriminalitas (Sukmaniar et al., 2021b). Dampak negatif dari adanya permukiman kumuh menjadi kekhawatiran pemerintah Kabupaten Tabanan sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan kawasan permukiman kumuh. Kawasan perumahan dan permukiman kumuh Kabupaten Tabanan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Tabanan tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) lokasi yang merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai belum maksimal layak huni karena tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, ketidakteraturan dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi syarat. Total luas wilayah permukiman kumuh sebagai perumahan di Kabupaten Tabanan sebesar 41,9 hektar yang berada di 4 (empat) kecamatan dengan mayoritas permukiman kumuh berada di Kecamatan Pupuan.

Permukiman kumuh di Kecamatan Pupuan tersebar pada 6 (enam) titik lokasi yang meliputi Banjar Dinas Asah Tegeh, Banjar Dinas Karyasari, Banjar Kayu Padi, Banjar Semoja, Banjar Mekarsari, dan Banjar Tamansari. Maka dari itu, perlu dilakukan identifikasi kondisi kekumuhan pada permukiman kumuh Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang dilihat dari masing-masing kriteria penentuan perumahan dan permukiman kumuh berupa kondisi jalan lingkungan, bangunan gedung, penyediaan air minum, drainase, sistem pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, proteksi terhadap kebakaran.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah bagaimana kondisi kekumuhan pada permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kekumuhan pada permukiman kumuh di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sehingga data yang diperoleh dapat dijadikan referensi dan pertimbangan dalam Menyusun kebijakan sebagai upaya mengurangi adanya permukiman kumuh di Kecamatan Pupuan.

Konsep Permukiman

Permukiman merupakan bagian dari salah satu lingkungan hidup/lingkungan hunian dapat berupa kawasan perkotaan atau perdesaan yang memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal (Stevani et al., 2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan bahwa permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian dengan lebih dari satu perumahan sebagai utilitas umum yang memiliki sarana, prasarana, berfungsi untuk menunjang kegiatan pada kawasan perkotaan dan perdesaan. Umumnya, kawasan permukiman menjadi bagian dari kawasan lingkungan hidup yang berada diluar kawasan lindung. Permukiman dapat berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai hunian dan lingkungan tempat tinggal bahkan sebagai tempat yang diperuntukkan dalam mendukung aktivitas penghidupan dan perikehidupan.

Permukiman Kumuh

Permukiman Kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018 dijelaskan sebagai permukiman yang belum dikategorikan layak huni dikarenakan tingginya tingkat kepadatan bangunan, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat dan ketidakteraturan bangunan. Kawasan permukiman kumuh juga menjadi bagian dari wilayah administrasi pemerintah dengan karakteristik khusus yang berada pada tingkat permasalahan dan keberadaannya membutuhkan penanganan secara spesifik dari berbagai aspek ekonomi, sosial, fisik serta sistem infrastruktur yang beragam (Indrajaya et al., 2022).

Kriteria Permukiman Kumuh

Kondisi kumuh pada suatu lingkungan permukiman dapat diukur dari besarnya tingkat derajat kekumuhan yang terjadi secara signifikan terhadap pengaruh besar proses terjadinya kekumuhan pada lingkungan permukiman. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terdapat kriteria yang digunakan dalam menentukan kondisi kumuh pada Kawasan permukiman dan perumahan sebagai berikut.

a. Bangunan Gedung

Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat (tata bangunan dan keandalan bangunan gedung).

- b. Jalan Lingkungan
Kondisi jalan lingkungan yang belum optimal dalam melayani seluruh lingkungan permukiman/perumahan dikarenakan kualitas kondisi permukaan jalan yang kurang baik.
- c. Penyediaan Air Minum
Akses penyediaan air minum tidak tersedia sehingga kebutuhan akan air minum belum dapat terpenuhi untuk setiap individu.
- d. Drainase Lingkungan
Ketersediaan drainase lingkungan belum memadai sehingga tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan yang berakibat munculnya genangan, dan menyebabkan kualitas konstruksi drainase menjadi semakin buruk.
- e. Pengelolaan Air Limbah
Sistem pengelolaan air limbah belum sesuai dengan persyaratan teknis, dimana ketersediaan sarana dan prasarana tidak cukup memadai yang berdampak pada terkendalanya sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat.
- f. Pengelolaan Persampahan
Keberadaan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan sampah belum dapat memenuhi persyaratan secara teknis.
- g. Proteksi Kebakaran
Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia yang meliputi pasokan air yang diperoleh dari sumber alami maupun buatan, kemudahan akses sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran dan kemudahan akses data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan. Sarana terkait adanya proteksi kebakaran tidak tersedia yang meliputi APAR, kendaraan pemadam kebakaran, dan mobil tangga sesuai fungsinya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis deskriptif kualitatif yang didukung dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan hasil-hasil terkait dengan kondisi wilayah studi yang mengacu pada beberapa indikator atau variabel yang digunakan (Jabbar et al., 2022). Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi kondisi kekumuhan pada lokasi penelitian. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan proses penilaian/skor terhadap kompleksitas dari permasalahan pada setiap indikator/variabel. Identifikasi kriteria permukiman kumuh dilakukan melalui observasi dan menganalisis tujuh indikator yang selanjutnya diberikan penilaian/skor.

Tabel 1. Kriteria Penilaian/Skor

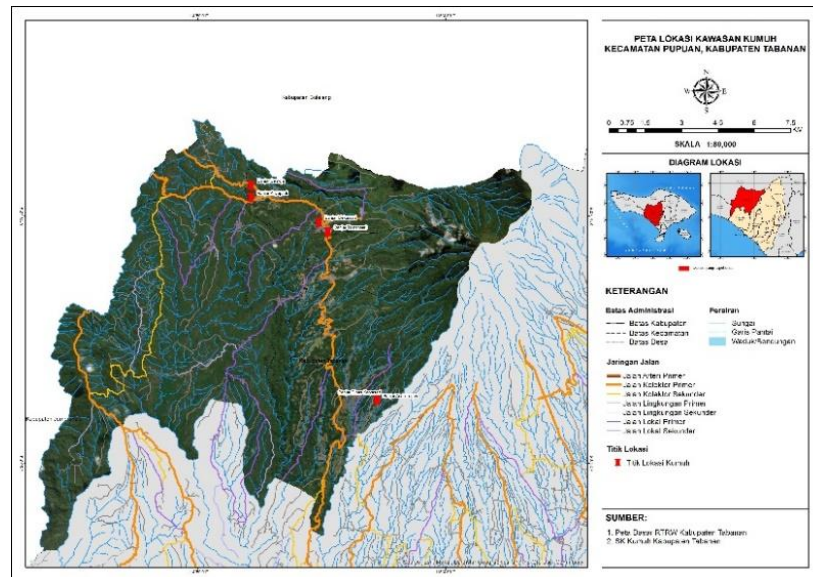
Kriteria Kumuh	Parameter Penilaian	Nilai/Skor
19 Kriteria Kumuh	25%-59% mengalami permasalahan berdasarkan kriteria kumuh	1
	51%-75% mengalami permasalahan berdasarkan kriteria kumuh	3
	76%-100% mengalami permasalahan berdasarkan kriteria kumuh	5

Sumber: Kementerian PUPR, 2016.

Setelah proses penilaian/skor dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah klasifikasi tingkat permukiman kumuh yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No.02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh sebagai berikut.

1. Tingkat kekumuhan berat, dengan indikasi adanya permukiman kumuh antara 76%-100%
2. Tingkat kekumuhan sedang, dengan indikasi adanya permukiman kumuh antara 51%-75%
3. Tingkat kekumuhan ringan, dengan indikasi adanya permukiman kumuh antara 26%-50%

Seluruh data dan informasi diperoleh dari data primer yaitu berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi pada lokasi penelitian. Lingkup lokasi pada penelitian ini mencakup seluruh permukiman kumuh yang tersebar di 6 titik lokasi pada Kecamatan Pupuan yang meliputi Banjar Dinas Asah Tegeh, Banjar Dinas Karyasari, Banjar Kayu Padi, Banjar Semoja, Banjar Mekarsari, dan Banjar Tamansari (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Sumber: Hasil analisis, RTRWK Tabanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemukiman kumuh di Kecamatan Pupuan mencapai 23,25 hektar dari 41,9 hektar total luas perumahan dan permukiman kumuh Kabupaten Tabanan. Permukiman kumuh Kecamatan Pupuan tersebar pada 6 titik lokasi yang meliputi permukiman kumuh Banjar Dinas Asah Tegeh seluas 3,73 hektar, permukiman kumuh Banjar Dinas Karyasari seluas 11,51 hektar, permukiman kumuh Banjar Kayu Padi seluas 2,34 hektar, permukiman kumuh Banjar Semoja seluas 1,23 hektar, permukiman kumuh Banjar Mekarsari seluas 2,51 hektar, dan permukiman kumuh Banjar Tamansari seluas 1,93 hektar. Secara keseluruhan, kondisi kekumuhan di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berada pada tingkat kekumuhan ringan dengan status lahan yang legal. Selain itu, dilihat dari tingkat kepadatan penduduk pada masing-masing kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Pupuan ini memiliki kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha. Adapun perincian mengenai kondisi permukiman kumuh pada masing-masing lokasi yang dijabarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai berikut.

1. Kawasan Banjar Dinas Karyasari

Kawasan Banjar Dinas Karyasari terletak di Desa Karyasari dengan total jumlah penduduk 1.044 jiwa dan kepadatan penduduknya kurang dari 150 Jiwa/Ha. Jumlah bangunan yang terdapat di Banjar Dinas Karyasari adalah sebanyak 240 unit. Kawasan permukiman kumuh Banjar Dinas Karyasari termasuk dalam kategori kumuh ringan. Adapun kondisi kekumuhan di Banjar Dinas Karyasari yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Bangunan Gedung

Dilihat dari kondisi bangunan rumah pada kawasan Banjar Dinas Karyasari, secara garis besar kondisi bangunan rumahnya dapat dikatakan tidak teratur dengan terdapat bangunan rumah yang belum memenuhi persyaratan teknis bangunan atau berupa rumah belum layak huni sebanyak 1 unit.

b. Jalan Lingkungan

Seluruh rumah pada permukiman kumuh Banjar Dinas Karyasari telah difasilitasi oleh jalan lingkungan dengan kondisi yang cukup baik.

c. Penyediaan Air Minum

Dalam penyediaan air minum, kawasan Banjar Dinas Karyasari telah tersedia akses air minum dengan dibangunnya Pamsimas pada tahun 2023 dan 2024 untuk melayani 240 KK warga Desa Karyasari.

d. Drainase Lingkungan

Pada aspek drainase lingkungan di kawasan Banjar Dinas Karyasari diketahui bahwa tidak tersedia drainase sepanjang 1.538 meter.

e. Pengelolaan Air Limbah

Dalam aspek pengelolaan air limbah di daerah Banjar Dinas Karyasari ditemukan bahwa 25 KK belum memenuhi standar teknis dan bahkan beberapa warga belum memiliki WC, sehingga masih terdapat warga yang BAB di tegalan ataupun di sungai.

f. Pengelolaan Persampahan

Secara keseluruhan kondisi pengelolaan persampahan di kawasan Banjar Dinas Karyasari belum maksimal dan sesuai dengan standar teknis dan persyaratan teknis.

g. Proteksi Kebakaran

Kawasan Banjar Dinas Karyasari masih belum memiliki prasarana proteksi kebakaran. Di samping itu juga, jarak pos pemadam kebakaran yang terletak di Kota Tabanan ke Banjar Dinas Karyasari membutuhkan waktu selama 45 menit.



Gambar 2. Kondisi Lingkungan Banjar Dinas Karyasari

Berdasarkan hasil data observasi, penilaian/skor tingkat kekumuhan di Banjar Dinas Karyasari dapat dikategorikan ringan dengan total nilai 27. Hasil penilaian/skor dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penilaian/Scoring Tingkat Kekumuhan di Banjar Dinas Karyasari

No.	Aspek	Kriteria	Nilai/Skor
1.	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	1
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1
2.	Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	1
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1
		b. Ketidaktersediaan Drainase	1
		c. Ketidakhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	1
		d. Tidak terpeliharanya Drainase	1
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	1
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	1
6.	Kondisi Pengelolaan Sampah	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	1
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	1
		c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5
Total Skor			27

2. Permukiman Kumuh Banjar Dinas Asah Tegeh

Kawasan Banjar Dinas Asah Tegeh terletak di Desa Karyasari dengan jumlah penduduk sebanyak 391 jiwa dan kepadatan penduduknya kurang dari 150 Jiwa/Ha. Jumlah bangunan yang terdapat di Banjar Dinas Asah Tegeh adalah sebanyak 97 unit. Kawasan permukiman kumuh Banjar Dinas Asah Tegeh termasuk dalam kategori kumuh ringan. Adapun kondisi kekumuhan di Banjar Dinas Asah Tegeh yang dijabarkan sebagai berikut.

- a. Bangunan Gedung
Pada kawasan ini, terdapat sebanyak 2 unit bangunan rumah yang belum sesuai dengan persyaratan teknis bangunan atau berupa rumah belum layak huni dan tingkat ketidakteraturan bangunannya sebesar 100%.
- b. Jalan Lingkungan
Secara keseluruhan, rumah warga telah dapat diakses dengan adanya jalan lingkungan dan dalam kondisi jalan secara eksisting cukup baik.
- c. Penyediaan Air Minum
Dalam penyediaan air minum, seluruh warga Banjar Dinas Asah Tegeh telah terlayani secara menyeluruh.
- d. Drainase Lingkungan
Pada Banjar Dinas Asah Tegeh belum tersedia drainase lingkungan sepanjang 2.165,11 meter.
- e. Pengelolaan Air Limbah
Dalam pengelolaan air limbah, setiap KK di Banjar Dinas Asah Tegeh telah memiliki *septic tank* di masing-masing rumah.
- f. Pengelolaan Persampahan
Pada pengelolaan sampah di Banjar Dinas Asah Tegeh belum sesuai dengan standar teknis dan persyaratan teknis, sehingga terdapat 121 KK tidak mendapat pelayanan persampahan.
- g. Proteksi Kebakaran
Untuk aspek proteksi kebakaran di Banjar Dinas Asah Tegeh, belum tersedia prasarana proteksi kebakaran sebanyak 97 unit.



Gambar 3. Kondisi Lingkungan Banjar Dinas Asah Tegeh

Berdasarkan hasil data observasi, penilaian/skor tingkat kekumuhan di Banjar Dinas Asah Tegeh dapat dikategorikan ringan dengan total nilai 35. Hasil penilaian/skor dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penilaian/Scoring Tingkat Kekumuhan di Banjar Dinas Asah Tegeh

No.	Aspek	Kriteria	Nilai/Skor
1.	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	1
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1
2.	Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	1
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1

No.	Aspek	Kriteria	Nilai/Skor
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1
		b. Ketidakterediaan Drainase	1
		c. Ketidakhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	1
		d. Tidak terpeliharanya Drainase	1
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	1
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	1
6.	Kondisi Pengelolaan Sampah	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	1
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	3
		c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5
Total Skor			35

3. Permukiman Kumuh Banjar Kayu Padi

Kawasan Banjar Kayu Padi terletak di Desa Pupuan dengan jumlah penduduk sebanyak 117 jiwa dan kepadatan penduduknya kurang dari 150 Jiwa/Ha. Jumlah bangunan yang terdapat di Banjar Kayu Padi adalah sebanyak 26 unit. Kawasan permukiman kumuh Banjar Kayu Padi termasuk dalam kategori kumuh ringan. Adapun kondisi kekumuhan di Banjar Kayu Padi yang dijabarkan sebagai berikut.

- a. Bangunan Gedung
Pada kondisi bangunan rumah di Banjar Kayu Padi, terdapat 1 unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan ketidakteraturan bangunan sebesar 100%.
- b. Jalan Lingkungan
Seluruh rumah dapat diakses dengan jalan lingkungan sepanjang 603,22 meter, tetapi sepanjang 404,36 meter memiliki kondisi jalan yang rusak.
- c. Penyediaan Air Minum
Seluruh warga telah terlayani akses air minum yang baik yang dapat menjangkau seluruh rumah.
- d. Drainase Lingkungan
Panjang drainase lingkungan di eksisting adalah sepanjang 152,45 meter dari total drainase ideal sepanjang 603,22 meter, sehingga 450,77 meter belum tersedia drainase lingkungan. Akan tetapi, sepanjang 80,67 meter mengalami kerusakan.
- e. Pengelolaan Air Limbah
Seluruh KK di Banjar Kayu Padi telah mengaplikasikan sistem pengelolaan air limbah dan sesuai dengan standar teknis.
- f. Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan persampahan di Banjar Kayu Padi belum sesuai dengan persyaratan teknis, begitu pula terdapat 33 KK yang prasarana dan sarana persampahannya belum sesuai persyaratan teknis.
- g. Proteksi Kebakaran
Pada Banjar Kayu Padi tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran.



Gambar 4. Kondisi Lingkungan Banjar Kayu Padi

Berdasarkan hasil data observasi, penilaian/skor tingkat kekumuhan di Banjar Kayu Padi dapat dikategorikan ringan dengan total nilai 33. Hasil penilaian/skor dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian/Scoring Tingkat Kekumuhan di Banjar Kayu Padi

No.	Aspek	Kriteria	Nilai/Skor
1.	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	5
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1
2.	Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	1
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1
		b. Ketidakterediaan Drainase	3
		c. Ketidakhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	1
		d. Tidak terpeliharanya Drainase	1
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	1
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	1
6.	Kondisi Pengelolaan Sampah	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	1
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	1
		c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1
7.	Kondisi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5
Total Skor			33

4. Permukiman Kumuh Banjar Semoja

Kawasan Banjar Semoja terletak di Desa Pupuan dengan jumlah penduduk sebanyak 117 jiwa dan kepadatan penduduknya kurang dari 150 Jiwa/Ha. Jumlah bangunan yang terdapat di Banjar Semoja adalah sebanyak 27 unit. Kawasan permukiman kumuh Banjar Semoja termasuk dalam kategori kumuh ringan. Adapun kondisi kekumuhan di Banjar Semoja yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Bangunan Gedung

Pada Banjar Semoja, sebanyak 26 unit bangunan rumah teridentifikasi mengalami ketidakteraturan bangunan.

b. Jalan Lingkungan

Panjang jalan lingkungan di eksisting adalah sepanjang 807,35 meter, tetapi sepanjang 401 meter jalan memiliki kondisi yang rusak.

c. Penyediaan Air Minum

Seluruh KK di Banjar Semoja telah terlayani akses air minum, sehingga seluruh warga tidak mengalami kesulitan dalam mengakses air minum.

c. Drainase Lingkungan

Luas kawasan Banjar Semoja adalah seluas 1,23 Ha, seluas 0,15 Ha kawasan terkena genangan. Total drainase idealnya adalah 807,35 meter, tetapi sepanjang 614,01 meter belum tersedia drainase lingkungan.

d. Pengelolaan Air Limbah

Seluruh KK di Banjar Semoja telah memiliki sistem pengelolaan air limbah dengan mengacu pada standar teknis yang telah ditentukan.

e. Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah di Banjar Semoja dengan jumlah KK sebanyak 34 KK belum memenuhi persyaratan teknis, begitu pula dengan prasarana dan sarana persampahannya yang belum sesuai standar teknis.

f. Proteksi Kebakaran

Kawasan Banjar Semoja belum memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang cukup memadai.



Gambar 5. Kondisi Lingkungan Banjar Semoja

Berdasarkan hasil data observasi, penilaian/skor tingkat kekumuhan di Banjar Semoja dapat dikategorikan ringan dengan total nilai 29. Hasil penilaian/skor dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Penilaian/Scoring Tingkat Kekumuhan di Banjar Semoja

No.	Aspek	Kriteria	Nilai/Skor
1.	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	5
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1
2.	Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	1
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1
		b. Ketidakterediaan Drainase	3
		c. Ketidakhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	1
		d. Tidak terpeliharanya Drainase	1
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	1
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	1
6.	Kondisi Pengelolaan Sampah	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	1

No.	Aspek	Kriteria	Nilai/Skor
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	3
		c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	3
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3
Total Skor			29

5. Permukiman Kumuh Banjar Mekarsari

Kawasan Banjar Mekarsari terletak di Desa Pujungan dengan jumlah penduduk sebanyak 325 jiwa dan kepadatan penduduknya kurang dari 150 Jiwa/Ha. Jumlah bangunan yang terdapat di Banjar Mekarsari adalah sebanyak 81 unit. Kawasan permukiman kumuh Banjar Mekarsari termasuk dalam kategori kumuh ringan. Adapun kondisi kekumuhan di Banjar Mekarsari yang dijabarkan sebagai berikut.

- a. Bangunan Gedung
Dalam aspek bangunan rumah, seluruh bangunan rumah atau 81 unit bangunan yang mengalami ketidakteraturan dan 2 unit bangunan yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.
- g. Jalan Lingkungan
Aspek jalan lingkungan pada Banjar Mekarsari adalah sepanjang 731,34 meter dengan tidak ada jalan yang mengalami kerusakan.
- h. Penyediaan Air Minum
Jumlah KK yang belum terlayani air minum adalah sebanyak 88 KK. Seluruh KK telah terlayani Pamsimas dengan sumber airnya ditampung di tanda dan reservoir yang kemudian dialirkan ke masing-masing warga.
- i. Drainase Lingkungan
Total drainase idealnya adalah sepanjang 731,34 meter, tetapi sepanjang 58,30 meter tidak tersedia drainase yang memadai dan sepanjang 318,50 meter drainase mengalami kerusakan.
- j. Pengelolaan Air Limbah
Sistem pengelolaan air limbah di Banjar Mekarsari belum sepenuhnya memenuhi standar dan persyaratan teknis yang berlaku.
- k. Pengelolaan Persampahan
Sistem pengelolaan sampah di Banjar Mekarsari telah sesuai dengan standar teknis termasuk ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah memadai.
- l. Proteksi Kebakaran
Dibutuhkan prasarana proteksi kebakaran sebanyak 81 unit dan sarana proteksi kebakaran sebanyak 69 unit untuk melayani seluruh warga Banjar Mekarsari.



Gambar 6. Kondisi Lingkungan Banjar Mekarsari

Berdasarkan hasil data observasi, penilaian/skoring tingkat kekumuhan di Banjar Mekarsari dapat dikategorikan ringan dengan total nilai 27. Hasil penilaian/skoring dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Penilaian/Scoring Tingkat Kekumuhan di Banjar Mekarsari

No.	Aspek	Kriteria	Nilai/Skor
1.	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	5
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1
2.	Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1 1
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1 1
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1
		b. Ketidakterediaan Drainase	3
		c. Ketidakhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	1
		d. Tidak terpeliharanya Drainase	1
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	1
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	3
6.	Kondisi Pengelolaan Sampah	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	1
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	1
		c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1
7.	Kondisi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1
Total Skor			27

6. Permukiman Kumuh Banjar Tamansari

Kawasan Banjar Tamansari terletak di Desa Pujungan dengan jumlah penduduk sebanyak 234 jiwa dan kepadatan penduduknya kurang dari 150 Jiwa/Ha. Jumlah bangunan yang terdapat di Banjar Tamansari adalah sebanyak 52 unit. Kawasan permukiman kumuh Banjar Tamansari termasuk dalam kategori kumuh ringan. Adapun kondisi kekumuhan di Banjar Tamansari yang dijabarkan sebagai berikut.

- a. Bangunan Gedung
Pada aspek bangunan gedung, terdapat 52 unit bangunan rumah yang mengalami ketidakteraturan bangunan.
- b. Jalan Lingkungan
Pada aspek jalan lingkungan di Banjar Tamansari telah tersedia akses jalan lingkungan sepanjang 581,18 meter dengan kondisi yang baik.
- c. Penyediaan Air Minum
Jumlah KK yang belum terlayani air minum aman adalah sebanyak 52 KK. Seluruh KK telah terlayani Pamsimas dengan sumber air ditampung di tandon dan reservoir sebelum dialirkan ke masing-masing warga.
- d. Drainase Lingkungan
Dari total drainase ideal sepanjang 581,18 meter, terdapat 126,24 meter yang belum dilengkapi dengan drainase.
- e. Pengelolaan Air Limbah
Seluruh warga belum memiliki sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan standar dan persyaratan teknis.
- f. Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan persampahan di Banjar Tamansari sudah sesuai dengan standar teknis yang dilakukan dengan pemungutan sampah dari pihak desa, sedangkan warga yang tidak berlangganan biasanya mengelola sampahnya secara mandiri.

g. Proteksi Kebakaran

Dibutuhkan prasarana proteksi kebakaran sebanyak 52 unit dan sarana proteksi kebakaran sebanyak 21 unit untuk melayani seluruh warga.



Gambar 7. Kondisi Lingkungan Banjar Tamansari

Berdasarkan hasil data observasi, penilaian/skor tingkat kekumuhan di Banjar Tamansari dapat dikategorikan ringan dengan total nilai 31. Hasil penilaian/skor dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Penilaian/Scoring Tingkat Kekumuhan di Banjar Tamansari

No.	Aspek	Kriteria	Nilai/Skor
1.	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	5
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1
2.	Kondisi Jalan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	1
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1
		b. Ketidakterediaan Drainase	3
		c. Ketidakhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	1
		d. Tidak terpeliharanya Drainase	1
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	1
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	1
6.	Kondisi Pengelolaan Sampah	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	1
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	3
		c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5
Total Skor			31

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, didapatkan bahwa terdapat 6 titik lokasi kumuh yang tersebar pada Kecamatan Pupuan yang meliputi Banjar Dinas Asah Tegeh, Banjar Dinas Karyasari, Banjar Kayu Padi, Banjar Semoja, Banjar Mekarsari, dan Banjar Tamansari. Melalui hasil identifikasi dari masing-masing kriteria berupa kondisi jalan lingkungan, bangunan, saluran drainase, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, pengolahan air limbah, hingga proteksi kebakaran diketahui bahwa seluruh permukiman kumuh yang terdapat di Kecamatan

Pupuan termasuk dalam kategori kumuh tingkat ringan dan status lahan yang legal dengan rincian data sebagai berikut.

- a. Banjar Dinas Karyasari: 27% (tingkat kekumuhan ringan)
- b. Banjar Dinas Asah Tegeh: 35% (tingkat kekumuhan ringan)
- c. Banjar Kayu Padi: 33% (tingkat kekumuhan ringan)
- d. Banjar Semoja: 29% (tingkat kekumuhan ringan)
- e. Banjar Mekarsari: 27% (tingkat kekumuhan ringan)
- f. Banjar Tamansari: 31% (tingkat kekumuhan ringan)

Secara keseluruhan, kondisi bangunan rumah pada masing-masing kawasan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Akan tetapi, pada beberapa tempat ditemukan bangunan yang tidak teratur dan belum sesuai dengan persyaratan teknis. Selain itu, pada beberapa tempat juga belum dilengkapi dengan drainase dan jalan dalam kondisi yang memadai. Begitu juga dengan pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran yang sarana dan prasarannya belum dapat tersedia sesuai dengan persyaratan dan standar teknis.

Berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan, saran yang dapat diberikan sebagai bentuk penanganan untuk menangani permasalahan, yaitu rencana peningkatan kualitas jaringan jalan; rencana penanganan rencana peningkatan kualitas infrastruktur jaringan persampahan dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan arahan untuk tidak membuang sampah ke sungai; pemeliharaan jaringan drainase dengan pembersihan rutin oleh masyarakat setempat; Rencana pengadaan proteksi bencana kebakaran dibutuhkan karena saat ini tidak terdapat proteksi bencana sebagai bentuk pencegahan. Dengan demikian, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrajaya, Rusida, Baharuddin, A. F., & Ermayanti. (2022b). Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Nelayan Dusun Pantai Bahari Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(3), 532–540. <https://doi.org/10.35965/eco.v22i3.1978>
- Jabbar, A., Hartanto, T., Tiaraningrum, F. H., Pratiwi, A. S., Zulaiha, L., Rahmawati, A., Danah Zulfani, S., & Ridho Fariz, T. (2022). *Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Di Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati*.
- Peraturan Menteri PU Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perumahan dan Permukiman Kumuh. Kawasan Jakarta: Kementrian PUPR.
- Praganingrum, T. I. (2024). Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Di Kawasan Kota Denpasar (Studi Kasus Permukiman Jalan Karya Makmur, Ubung Kaja, Denpasar Utara). *Ganec Swara*, 18, 1652–1659. <http://journal.unsmataram.ac.id/index.php/GARA>
- Stevani, H., Dewantoro, F., Ismail, M. R., & Pratiwi, D. (2023). *Penilaian Kinerja Kelayakhunian Permukiman Di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung*. 04(01), 25–35. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/tekniksipil>
- Sukmaniar., Kurniawan, A., & Pitoyo, A. J. (2021b). Hazard Level of Slum Areas in Palembang City. *In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 884, No. 1, p. 012055). IOP Publishing.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Winata, I. M. O. A., Wiguna, I. N. R. A., Nugraha, I. G. D. A., Prabawa, M. S., & Widjajanti, W. W. (2021). Identifikasi Karakteristik Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Area Barat Terminal Pesiapan. *UNDAGI: Jurnal Ilmiah Arsitektur Universitas Warmadewa*. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/undagi/index>